

# Harta Mendagri Tito Karnavian yang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah

Category: Hukum

written by Redaksi | 04/03/2025



**ORINEWS.id** – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjadi salah satu pihak yang ikut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)).

Pelaporan ini terkait dugaan praktik korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Tito dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK pada Jumat, 28 Februari 2025.

Pelaporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 11 miliar hingga Rp 13 miliar.

## Harta Kekayaan Tito Karnavian

Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 16 Maret 2024, Tito Karnavian memiliki harta kekayaan sebesar Rp 25,8 miliar.

Tepatnya harta kekayaan Tito Karnavian mencapai Rp

25.898.566.375.

Bukan tanah dan bangunan yang menjadi penyumbang harta kekayaan Tito Karnavian.

Melainkan kepemilikan kas dan setara kas yang mencapai Rp 17,3 miliar.

Sementara aset tanah dan bangunan menjadi penyumbang ke-2 dengan nilai Rp 7,8 miliar.

Aset lain yang dimiliki Tito Karnavian adalah satu unit mobil sedan senilai Rp 400 juta.

Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Mendagri Tito Karnavian, dikutip [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 7.895.951.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m<sup>2</sup>/207 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.273.397.000
2. Tanah Seluas 2500 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp 35.420.000
3. Tanah Seluas 308 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp 142.912.000
4. Tanah Seluas 196 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp 55.860.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp 565.044.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m<sup>2</sup>/96 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp 147.010.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp 702.420.000
8. Tanah Seluas 442 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp 205.088.000
9. Tanah Seluas 4556 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp 768.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 400.000.000

1. MOBIL, SEDAN SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp  
400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 260.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 17.342.615.375

F. HARTA LAINNYA Rp 0

Sub Total Rp 25.898.566.375

UTANG Rp 0

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 25.898.566.375

## **Kronologi Tito Karnavian Dilaporkan**

Kecurigaan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran bermula setelah tersebarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

SE itu menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada 21 hingga 28 Februari 2025 dan menyebutkan bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI)

Setelah hal itu ramai di media sosial, selanjutnya muncul Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Surat itu menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, KontraS, dan ICW, kegiatan retreat kepala daerah diduga melanggar ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Proses pengadaan yang tidak transparan dan tidak terbuka ini diduga melanggar standar pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas.

Koalisi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT LTI, yang tergolong perusahaan baru, sebagai pelaksana retreat karena perusahaan itu diduga diurus kader Partai Gerindra.

“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa, pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” kata Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari yang mewakili koalisi, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

Menurut Feri, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

Namun, prinsip tersebut tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

“Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia,” kata dia.

“Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

## **Istana Siap Buka-bukaan**

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon soal pelaksanaan retreat Kepala Daerah di Akmil.

Menurut Hadi, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksana retreat tersebut.

“Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar,” kata Prasetyo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Ia mengatakan bahwa hak setiap orang untuk mengadakan laporan kepada penegak hukum. Yang pasti kata dia, Pemerintah selalu transparan dalam menggelar setiap kegiatan.

“Ya itu hak kalau melaporkan,” katanya

“Semua bisa kita buka,” imbuhnya.

Terkait keterlibatan PT Lembah Tidar dalam kegiatan tersebut, Prasetyo memastikan tidak ada yang dilanggar. PT tersebut merupakan pengelola acara, dan penunjukannya telah sesuai prosedur.

“Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” katanya. [source:tribunnews]